

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Supervisi

1. Implementasi

Secara etimologis, konsep implementasi menurut kamus webster berasal dari bahasa inggris, yaitu implement. Dalam kamus, implementas berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya, Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah Tindakan – Tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang dan berkepentingsn, baik pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita – cita serta tujuan yang telah di tetapkan . (Ziaggi Fadhil Zahran 2016)

Implementasi berkaitan dengan berbagai Tindakan yang di lakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah di susun demi tercapainya tujuan program yang telah di rencanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang di tetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak di capai. Definsi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu, definisi implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Karena itu, akan membei anda gambaran tentan bagaimana anda harus bersikap terhadap tujuan anda, (Journal Universitas Medan Area Hall- 11)

a. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

1) Nurman Usman

Implementasi adalah adanya sesuatu kegiatan, Tindakan , aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya sesuatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang di rencanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

2) Purwanto dan Sulistyastuti

Menurut purwanto dan sulistyastuti , implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang di jalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut

3) Sudarsono

Menurut sudarsono dalam bukunya “analisi kebijakan public” , implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (*tools*) untuk memperoleh hasil akhir yang di inginkan

4) Solichin Abdul Wahab

Menurut solichin, implementasi adalah Tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintahan atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang di gariskan dalam suatu keputusan kebijakan

5) Widodo

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemungkinan mempunyai dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.

6) Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier memahami bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan hukum dasar, juga dalam bentuk perintah atau keputusan atau, atau putusan pengadilan, proses penegakan terjadi setelah melalui beberapa tahapan hukum, kemudian keluar beberapa keputusan kebijakan penegakan, dan seterusnya, hingga kebijakan korektif dilibatkan

7) Hanifah Harsono

Menurut Hanifa Harsono, implementasi adalah proses mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi Tindakan kebijakan

dari politik hingga administrasi mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan program

8) Prof. H. Tachjan

Prof. H, Tachjan mendefinisikan implementasi sebagai kebijakan public, proses kegiatan administrasi setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini berada di antara pengembangan kebijakan dan kebijakan. Evaluasi kebijakan mengandung logika top-down, yang menyiratkan interpretasi yang lebih rendah/alternatif.

9) Van meter dan Van Horn

Implementasi, sebagai mana didefinisikan oleh van meter dan van horn, adalah Tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, Lembaga pemerintahan atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang di gariskan dalam beberapa keputusan. Badan - badan ini melakukan tugas – tugas pemerintahan yang mempengaruhi warga negara

10) Friedrich

Implementasi adalah kebijakan yang mengacu pada Tindakan individu, kelompok, atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu, dalam kaitannya dengan hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang di inginkan, sehingga mencapai tujuan

b. Model implementasi

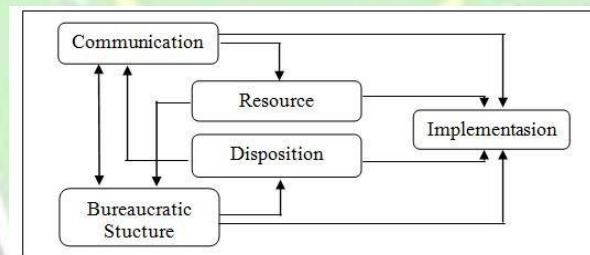
Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan public maka perlu di ketahui variable dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, di perlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat di pakai untuk menganalisis sebuah implementasi yang dikemukakan oleh George Edward II. (George Edward 2011) dan (Widodo 2011) Melihat implementasi kebijakan

sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berintraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor – faktor tersebut perlu di tampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus di ajukan dua pertanyaan pokok yaitu;

- 1). Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ?
- 2). Apakah faktor utama dalam keberhasilan implementasi ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor– faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

Gambar 1.2 Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

Berikut adalah penjelasan dari model implementasi George C. Edward III , yang pertama dari (*Communication*) faktor komunikasi , Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal–hal apa saja yang berhubungan dengan

pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Dari (*Communication*) lanjut ke (*Resources*) Sumber Daya Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan–ketentuan atau aturan–aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber–sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

Lanjut dari (*Resources*) lanjut ke (*Bureaucratic Structure*) Struktur Birokrasi Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan

biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. (Journal Universitas Medan Area Hall-17)

Dari (*Bureucratic Structure*) lanjut ke (*Disposition*) Disposisi Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Dari (*Disposition*) balik lagi ke (*Communication*) Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. setelah dari penjelasan di atas langsung ke (*Implementasion*)

c. Jenis-Jenis Implementasi

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012: 101-102) menjelaskan bahwa penegakan

kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Tujuannya adalah kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurut Nugroho (2003:158), ada dua pilihan implementasi kebijakan, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program dan melalui perumusan kebijakan yang bersumber atau diturunkan dari kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang digariskan Nugroho ada dua opsi dimana yang pertama dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program dan yang kedua melalui perumusan kebijakan. Menurut Edward (dalam Winarno, 2002: 125), implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara perumusan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa gagal, meskipun kebijakan yang brilian juga bisa gagal jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang mengimplementasikannya. Implementasi merupakan tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan publik. Sebuah program politik harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut William. N. Dun (2000:2-25) merekomendasikan bahwa pada setiap tahapan proses perumusan kebijakan publik, termasuk tahapan

implementasi kebijakan, penting untuk dilakukan analisis. Analisis yang dimaksud tidak sama dengan evaluasi karena dari tahap penetapan agenda hingga evaluasi kebijakan harus dilakukan analisis.

2) Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah:

- a) Menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya.
- b) Pastikan pengguna dapat menggunakan sistem baru
- c) Periksa apakah sistem baru cocok untuk pengguna.
- d) Pastikan transisi ke sistem baru berjalan dengan baik dengan perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan instalasi baru.

3) Implementasi Pendidikan

Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia manajemen, setiap guru setelah merancang program dan rencana tertentu akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan rencana tersebut untuk mencapai keberhasilan dan mencapai tujuan yang diinginkan. dengan aturan yang berlaku. Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program, Masalah akan muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi. Kegiatan Pokok Implementasi Pendidikan diantaranya :

- a) Pengembangan Program

Pengembangan kurikulum meliputi pengembangan silabus tahunan (silabus umum untuk setiap mata pelajaran), silabus semester (berisi item yang akan disampaikan selama semester), silabus modular, modul/mata pelajaran (lembar, mata kuliah, tanya jawab), program mingguan dan program harian (untuk kemajuan dan kesulitan siswa), program pengayaan dan bimbingan belajar, dan program Bimbingan dan Konseling

b) Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pembelajaran, tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku siswa. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP dan kurikulum 2013 terdiri dari tiga isi, yaitu pendahuluan, kegiatan dasar, dan bagian penutup.

c) Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan bagaimana, bagaimana, dan bagaimana tujuan pendidikan itu dicapai, dimana hasil penilaian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam penilaian ini adalah cara-cara mengatasi masalah yang dihadapi saat timbul dalam belajar. Pelaksanaan tidak terbatas pada pelaksanaan suatu program (kurikulum, pembelajaran) tetapi sebelum pelaksanaan, guru telah merancang rencana pembelajaran sesuai dengan program yang berlaku, tugas selanjutnya adalah pelaksanaan kerja dan terakhir evaluasi. Dari hasil evaluasi akan diambil keputusan apakah desain memenuhi tujuan atau memerlukan perencanaan ulang.

d) implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi dan di mana Anda mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan

perangkat lunak manajemen tugas baru untuk meningkatkan efisiensi tim internal. Memiliki rencana strategis itu baik. Namun, jika Anda tidak memiliki bandwidth, sumber daya, dan dukungan untuk dijalankan, rencana strategis tidak akan membuat perubahan nyata dalam organisasi. Kami akan membahas langkah-langkah kunci untuk menerapkan strategi, termasuk potensi risiko dan cara menghindarinya, dan memperkenalkan beberapa kerangka kerja untuk membantu Anda berhasil menerapkan strategi yang sedang anda gunakan .

e) Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Untuk itu, muncul beberapa komentar di bawah ini mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014: 657), “implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan mencapai tujuannya”. Menurut Huntington (Mulyadi, 2015: 24), perbedaan terpenting antara satu negara dengan negara lain bukan terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kepemimpinannya. Tingkat kompetisi ini dapat dilihat dari kemampuan menjalankan setiap keputusan atau kebijakan suatu jabatan politik, kabinet atau presiden negara tersebut.

Grindle (Waluyo, 2007: 49) menyatakan: “Implementasi praktis bukan hanya tentang mekanisme pengambilan keputusan kebijakan menurut prosedur normal melalui jalur birokrasi, tetapi lebih dari itu, ini tentang konflik, keputusan siapa yang Anda dapatkan dari sebuah kebijakan.

2. Supervisi

Supervisi adalah aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar, aman, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan, menilainya, hingga mengoreksi. Kesimpulannya, supervisi adalah usaha yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada guru-guru agar mampu memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Fungsi supervisi pendidikan adalah untuk penelitian, penilaian, perbaikan dan pembinaan. Apa itu supervisi pada guru? supervisi pada guru merupakan usaha memberi pelayanan, agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Tidak hanya sekedar pengawasan fisik tapi juga terhadap material. Misalnya, seperti pengawasan terhadap kegiatan akademik (proses belajar mengajar), pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi belajar dan lain-lain. Kegiatan supervisi bisa dibilang untuk membantu guru. Namun, dalam konteks yang luas juga menyangkut tentang komponen sekolah yang lain, seperti komponen tata usaha, sarana, serta lingkungan sekolah.

Pihak yang melakukan supervisi yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan supervisi bisa dilakukan secara efektif, seperti kunjungan kelas, diskusi kelompok, pembinaan individual, serta simulasi pembelajaran.

a. Tujuan Supervisi

Tujuan Supervisi sebagai berikut :

- 1) Membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan, serta membantu peranan sekolah mencapai tujuan tersebut.

- 2) Meningkatkan kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang efektif.
- 3) Membantu guru mengadakan diagnosis dengan kritis, serta dalam kesulitan mengajar.
- 4) Meningkatkan kesadaran guru dan warga sekolah tentang tata kerja yang demokratis dan kooperatif.
- 5) Membantu guru untuk bisa mengevaluasi aktivitasnya, untuk tujuan aktivitas perkembangan peserta didik.
- 6) Mengembangkan 'esprit de corps' guru, yang menjadi rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru.
- 7) Meningkatkan komunikasi dan saling mengawasi di dalam suatu manajemen

b. Perencanaan Supervisi

Perencanaan supervisi pendidikan yang bertujuan menyusun dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan guru untuk membantu guru guna mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah tujuan dan sarana, baik sarana personal maupun material. Adapun prosedur yang perlu ditempuh dalam perencanaan adalah:

- 1) Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan.
- 3) Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan
- 4) Menentukan tahap-tahap satu rangkaian-rangkaian kegiatan.
- 5) Merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan.

Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. (Muwahid Shulhan dan Soim, Teras, 2013. Jadi tujuan supervisi secara umum adalah membantu para guru agar dapat melaksanakan pembelajarannya dengan lancar dan optimal. Prestasi para peserta didik sangatlah terpengaruhi dari bagaimana guru memberikan pembelajarannya

dengan maksimal. Darisitulah kepala sekolah harus bersikap profesional dalam melaksanakan supervisi agar dapat berefek terhadap kinerja guru.

c. Pelaksanaann Supervisi Kepala Sekolah

Pelaksanaan supervisi terdiri dari dua hal yaitu model supervisi dan teknik supervisi:

1) Model Supervisi

Pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah dapat menggunakan model supervisi tradisional atau model supervisi kontemporer. Model supervisi tradisional, supervisi meliputi;

a) Observasi langsung.

Supervisi model ini dilakukan dengan observasi langsung pada kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur; pra-observasi, observasi dan post-observasi.

b) Observasi tidak langsung

Supervisi model tidak langsung pada guru dilaksanakan melalui; tes dadakan pada siswa sesuai materi yang diajarkan guru. Diskusi kasus; berdasarkan temuan observasi, hasil studi, studi kasus dengan mencari akar masalahnya serta alternatif penyelesaiannya. Angket; tentang kualifikasi guru, kinerja guru, dan sebagainya.

c) Model kontemporer

Supervisi akademik model kontemporer bersifat kolaboratif yang dilaksanakan dengan supervisi klinis berdasarkan pada inisiatif guru sendiri mendatangi kepala sekolah (supervisor) untuk membantu mendiagnosis, memecahkan masalah, dan mengembangkannya dalam pengembangan profesi guru.(Abdul kadir, Skripsi (2017). hlm. 10.)

d) Teknik Supervisi

Secara garis besar cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Teknik Perseorangan

Yang dimaksud dengan supervisi secara perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan, kegiatannya yaitu,

- a. Mengadakan kunjungan kelas, yaitu kunjungan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar.
- b. Pertemuan individual, yaitu satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru.
- c. Mengadakan Kunjungan Observasi yaitu, guru dari suatu sekolah diberi tugas untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar.
- d. Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa.
- e. Membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. (Rodliyah, , 2014).

2) Teknik Kelompok

Adalah supervisi yang dilakukan secara kelompok dengan menggunakan beberapa strategi diantaranya adalah:

- a. Mengadakan pertemuan atau rapat, kepala sekolah menjalankan tugas sesuai perencanaan seperti mengadakan rapat kepada guru dalam rangka supervisi kepala sekolah.
- b. Mengadakan diskusi kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok guru dengan bidang studi yang sama dengan usaha mengembangkan proses belajar mengajar.
- c. Mengadakan penataran untuk bidang studi tertentu pada umumnya diadakan oleh pusat atau wilayah, dan tugas

kepala sekolah adalah mengolah dan membimbing guru-guru untuk di tindak lanjut.(Muwahid Shulhan, 2012).

e) Tindak Lanjut Supervisi Kepala Sekolah

Tindak Lanjut Supervisi Kepala sekolah terbagi menjadi dua hal yaitu evaluasi pembelajaran dan pelatihan guru.

f) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi: tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektifitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektifitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektifitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan.

B. Profesionalitas Guru

1. Profesionalitas

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi wartawan harus memiliki sikap profesionalitas yang salah satunya mematuhi kode etik wartawan, karena bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (2002:897), profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.

Pendapat Gunawan yang dikutip oleh Alex Sobur (2001:82) dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani”, mendefinisikan profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu. Pendapat Alex Sobur (2001:82) dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

a. Karakteristik Profesionalisme

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli:

Pendapat Sinamo yang dikutip oleh Sritomo Wignjosoebroto (1999:42) dalam seminar "Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional", mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
- 2) Orientasi Memuaskan Pelanggan
- 3) Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
- 4) Budaya Belajar Sepanjang Hayat
- 5) Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
- 6) Hubungan Cinta dengan Profesinya
- 7) Sikap Melayani yang Altruistik
- 8) Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.

Pendapat Terence J. Johnson yang dikutip oleh Alex Sobur (2001:78) dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa ada enam kriteria profesional, yakni:

- 1) Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis
- 2) Penyediaan pelatihan dan pendidikan
- 3) Pengujian kemampuan anggota
- 4) Organisasi
- 5) Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional
- 6) Jasa pelayanan yang sifatnya altruistic

Pendapat Soetedjo (2003:34), mengemukakan bahwa seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu :

- 1) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
- 2) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
- 3) Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

- 1) Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik
 - a) Mencintai Profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai Profesi
 - b) Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total
 - c) Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan
- 2) Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Profesinya, diantaranya
 - a) Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis

- b) Pelatihan dan Pendidikan
- c) Pengujian kemampuan calon anggota
- d) Budaya belajar sepanjang hayat
- e) Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan
- 3) Tertampung dalam organisasi
 - a) Berpartisipasi penuh dalam asosiasi
 - b) Memahami visi dan misi organisasi profesi
- 4) Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan
- 5) Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

2. Guru

Secara umum dalam Bahasa Indonesia pengertian guru adalah merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

a. Tugas dan Peran Guru

1) Tugas guru

Guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas: yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa. (Akhyak, Profil Pendidik)

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus menjadi idola para murid atau siswanya. Tugas guru dalam kemasyarakatan adalah bahwa masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan.

Seorang guru sangat berperan sekali dalam dunia pendidikan. Guru mempunyai tugas yang harus dilaksanakan di sekolah, yaitu guru harus memberikan pelayanan kepada para peserta didik dengan baik, di harapkan peserta didik itu menjadi anak yang selaras dengan tujuan sekolah tersebut.

2) Peran guru

a) Guru sebagai Demonstrator

Dalam hal ini guru hendaknya senantiasa menguasai bahan. Dialah yang memilih dari berbagai ilmu pengetahuan, kadar yang lazim dan sesuai dengan murid; maka tugasnya meliputi mempelajari kejiwaan murid dan memiliki pengetahuan yang sempurna/lengkap tentang ilmu-ilmu mengajar.

Oleh karena itu guru harus mengkaji kejiwaan anak, sehingga memungkinkan terjadi perubahan yang baik dari kejiwaannya, kepada tingkah laku yang baik dan berakhlak yang mulia. Guru hendaknya tetap percaya atas kemampuan dirinya dengan pendidikan mudah melatihnya.

b) Guru sebagai pengelola kelas

Dalam perannya sebagai pengelola kelas (learning manager) guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu di organisasikan. Guru harus selalu mengawasi peserta didik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada proses

pembelajaran. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memberikan kenyamanan dan memberikan kepuasan dalam mencapai tujuan.

c) Guru sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar, dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi. Guru harus memberikan sumber belajar yang berguna bagi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Karena media pembelajaran itu sangat membantu proses belajar peserta didik.

d) Guru sebagai Evaluator

Evaluasi pendidikan adalah proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, dan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan.

Guru dalam menilai hasil belajar peserta didik harus mengikuti hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dari waktu-kewaktu. Umpan balik itu akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya.

e) Guru sebagai Motivator

Motivasi adalah "pendorongan", suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkahlaku seseorang agar ia bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Guru harus mampu menumbuhkan motivasi, baik motivasi langsung maupun motivasi tidak langsung. Karena kesemua itu akan berpengaruh kepada kemampuan peserta didik untuk meningkatkan minat dalam

belajar. Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kurikulum.

f) Guru sebagai Inovator

Pembaharuan (Inovator) pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa peran guru itu sangat banyak dan sangat berpengaruh dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa peserta didik kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar peserta didik melalui interaksi belajar-mengajar.

